

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	SVARA KARYA	8	2-8-2002

Warga Papua Keberatan Larangan Mengolah Nikel Dan Ekspor Kayu Bulat

Kini saatnya bagi pemuda dan masyarakat Kawasan Timur Indonesia bangkit untuk menuntut hak hidupnya di atas kekayaan tanah mereka sendiri yang sekarang masih mendapat tekanan kuat dari pemerintah pusat.

Dihadapan Menteri Negara Percepatan Pembangunan KTI (Kawasan Timur Indonesia), Drs Manuel Kaisiepo, peserta Temu Regional I KNPI KTI menyatakan menolak munculnya larangan mengolah Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Sorong, Papua serta larangan ekspor kayu bulat oleh Menteri Kehutanan.

"Kami pemuda dan masyarakat KTI khususnya Papua, Maluku dan Maluku Utara, menyatakan, menolak larangan penambangan nikel di di Pulau Gag juga menolak larangan ekspor kayu bulat (PP Nomor 34/2002). Pasalnya larangan tersebut ternyata telah mempersulit masyarakat di Papua khususnya yang mengharapkan nafkah dari kedua sektor tersebut," kata Sekretaris KNPI Kabupaten Sorong, Alfgris Labagu dalam tatap muka warga KNPI Regional I KTI dengan Manuel

Kaisiepo di Hotel Sahid Marid Sorong akhir pekan lalu.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Papua telah bosan dengan berbagai aturan yang diterapkan oleh Menteri Kehutanan. Permasalahannya larangan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan itu selalu saja bertentangan dengan upaya peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat Papua seperti yang terjadi saat ini. Dikatakan, melarang ekspor kayu log dari Papua sama saja dengan telah mengebiri perekonomian masyarakat karena harga kayu dalam negeri sangat murah. Jika dibandingkan dengan luar negeri, harga kayu log dalam negeri sangat murah serta pembelinya juga dipastikan sangat kecil karena kebutuhan dalam negeri masih sangat rendah.

Berkaitan dengan larangan penambangan nikel di Pulau Gag karena kawasan itu sebagai hutan lindung, kata Labagu adalah sangat tidak masuk akal, pasalnya pulau tersebut terdiri dari tanah gundul. "Pulau Gag terdiri dari bebatuan yang tandus, bukan hutan lindung seperti yang diekspos di Jakarta tentang kondisi

pulau tersebut sebagai hutan lindung," kata Alfgris Labagu.

Ia menjelaskan, Perusahaan Nikel yang kini sudah dilarang beroperasi pernah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian masyarakat Pulau Gag dan sekitarnya. Kini masyarakat di Pulau Gag dan sekitarnya mulai menderita tak lagi menikmati keuntungan dari Perusahaan Nikel seperti menjual ikan atau hasil pertanian lainnya kepada karyawannya yang jumlahnya ribuan orang.

Masyarakat di Pulau Gag dan sekitarnya, ketika Perusahaan Nikel milik Australia itu melakukan eksplorasi, sudah menerima berbagai fasilitas seperti di bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan perekonomian setempat. Kini masyarakat sekitar Pulau Gag dan warga Raja Ampat Sorong umumnya tak merasakan lagi stabilitas ekonomi seperti yang dikontribusikan oleh Perusahaan Nikel tersebut kepada warga ini.

Berbagai upaya melalui Gubernur JP Salosa dan Bupati Kabupaten Sorong JP Wanane untuk meneruskan keluhan masyarakat

Sorong tentang kasus Pulau Gag itu namun hasilnya tak ada kemajuan. Itu semua, kata Labagu disebabkan karena Menteri Kehutanan tetap pada prinsipnya bahwa Pulau Gag merupakan kawasan hutan lindung sehingga tak boleh mendapat izin untuk penambangan nikel yang terkandung di dalamnya.

Eksplotasi

Dari KNPI Maluku Utara, J Conoras, juga mendukung pernyataan Alfgris Labagu untuk minta Menteri Kehutanan segera mencabut larangan penambangan nikel di Pulau Gag dan larangan ekspor kayu log. "Kami masyarakat KTI khususnya Maluku, Maluku Utara dan Papua selama ini hanya dija-

dikan sebagai masyarakat daerah pinggiran yang hanya bisa menikmati sesuatu sisa bagian dari kawasan Barat. Padahal hasil alam dari ketiga provinsi ini yang paling banyak dieksploitasi oleh pusat untuk kepentingan semua pihak," kata Conoras.

Padahal jika dilihat dari tingkat kesulitan ekonomi, kawasan Timur Indonesia khususnya Maluku, Maluku Utara dan Papua

sangat tertinggal jauh di belakang dari berbagai aspek. Ia mencontohkan di tiga daerah tersebut ada masyarakat desa-desa tertentu yang untuk mencapai kota kecamatan atau kota kabupaten saja mengeluarkan ongkos Rp 1 juta per orang. Padahal kalau di Pulau Jawa, uang Rp 1 juta untuk keluarga lapis bawah sudah mencukupi kebutuhan makan untuk beberapa lama.

Perbandingannya adalah kalau mencapai kota kecamatan atau kabupaten saja ongkosnya sudah Rp 1 juta lebih per orang sedangkan penghasilan mereka Rp 50 sampai Rp 100 ribu per bulan. Itu sungguh sangat ironis. Untuk pergi ke kota mereka harus menyiapkan uang bertahun-tahun baru mencapai

simpanan Rp 1 juta itu.

Bagi warga KTI di tiga provinsi tersebut, lanjut Conoras, sebaiknya pemerintah pusat saat ini harus memberikan kemudahan-kemudahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, bukan kebutuhan nasional seperti larangan mengekspor kayu bulat mau pun larangan penambangan nikel di Pulau Gag itu.

Ini penting agar percepatan pembangunan ekonomi di tiga provinsi tertimur itu dapat meningkat dengan harapan masyarakat KTI umumnya akan makmur di atas tanahnya sendiri dan juga demi untuk keutuhan wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Menteri Negara Percepatan Pembangunan KTI Manuel Kaisiepo, mengatakan masukan dan saran dari para pemuda KNPI Regional I KTI itu akan ditampung untuk segera disalurkan kepada Menteri-Menteri yang bersangkutan.

"Saya akan menyampaikan masukan dari para pemuda KNPI Regional I KTI ini kepada Menteri yang terkait dengan permasalahan yang disampaikan saat ini," kata

Kaisiepo.

Manuel Kaisiepo mengharapkan kerja keras KNPI di tiga wilayah itu membantu pemerintah demi untuk mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu yang ada. "Untuk meningkatkan ekonomi di kawasan Timur Indonesia, maka Kapet (kawasan pengembangan ekonomi terpadu) yang jumlahnya 12 unit di kawasan ini harus ditingkatkan. Yang sudah maju ditingkatkan dan yang masih tinggal di tempat akan dievaluasi untuk mencari solusi terbaiknya," kata Kaisiepo.

Menyangkut masalah Pulau Gag, Kaisiepo berjanji akan menyampaikan permasalahan itu kepada Menteri Kehutanan serta instansi terkait di Jakarta untuk dicari jalan ke luar yang terbaik. Begitu pula menyangkut larangan ekspor kayu log akan disampaikan juga kepada Menteri Kehutanan serta instansi terkait lainnya di Jakarta.

Disamping masalah PT Persero Usaha Mina yang kini telah tutup akan disampaikan kepada Meneg BUMN Ir Laksamana Sukardi di Jakarta. Terutama untuk mencari

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL

solusi terbaik karena karyawan Usaha Mina itu sudah hampir setahun ini tidak menerima gaji dan tunjangan lainnya, padahal perusahaan itu milik pemerintah (BUMN-Red).

Masih banyak lagi masalah yang disampaikan oleh para peserta, baik dari Jajawijaya, Manokwari dan Pakfak yang pada dasarnya minta pemerintah segera membangun infrastruktur dasar di daerah pertumbuhan baru di tiga provinsi tersebut. Di samping ada pula penanya dari Kodya Sorong, Lukas Naa SH minta agar pemerintah segera memekarkan provinsi Papua menjadi 3 seperti yang sudah dicetuskan dua tahun lalu.

Khusus mengenai usulan agar Papua dijadikan 3 provinsi, Manuel Kaisiepo, mengatakan, saat ini belum tepat. Kini konsentrasi masyarakat Papua masih tertuju pada percepatan pembangunan ekonomi melalui Otsus sehingga mengenai pemekaran Provinsi masih belum terpikirkan kecuali saat ini hanya ada pemekaran kabupaten dan kecamatan serta lurah.

(Yacob Naulu)